



---

## DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA

Adhitya Wardhana<sup>1</sup>, Bayu Kharisma<sup>2</sup>

---

### *Article history:*

Submitted: 15 Februari 2021

Revised: 7 Maret 2021

Accepted: 9 Maret 2021

---

### **Keywords:**

*Mean of Years Schooling;*

*Population Poverty Rate;*

*Government Spending;*

*Data Panel Regression Methods;*

---

### **Kata Kunci:**

Rata-Rata Lama Sekolah;

Jumlah Penduduk;

Tingkat Kemiskinan;

Belanja Pemerintah;

Metode Regresi Panel Data;

---

### **Koresponding:**

Departemen Ilmu Ekonomi

Universitas Padjadjaran

Jawa Barat, Bandung

*Email:*

[adhitya.wardhana@fe.unpad.ac.id](mailto:adhitya.wardhana@fe.unpad.ac.id)

### *Abstract*

Indonesia is one of the countries with the largest unemployment in ASEAN countries. This condition is because some provinces still have unemployment rates that exceed unemployment in Indonesia. Low public education, high poverty and population in several provinces of Indonesia are among the causes of the increase in the unemployment rate in Indonesia. This research will discuss how much influence the education sector has on the average years of schooling (RLS), population, poverty rate and government spending on housing in Indonesia. The research model uses data panel regression method with a scope of 33 provinces in Indonesia. The results explain the average length of school and spending negatively affect unemployment. Then variable population numbers, the poverty rate affects positively towards unemployment.

---

### **Abstrak**

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pengangguran terbesar di negara ASEAN. Kondisi tersebut dikarenakan beberapa provinsi masih memiliki angka pengangguran yang melebihi pengangguran di Indonesia. Pendidikan masyarakat yang masih rendah, tingginya kemiskinan dan jumlah penduduk di beberapa provinsi Indonesia menjadi salah satu penyebab pertambahan angka pengangguran di Indonesia. Penelitian ini akan membahas seberapa besar pengaruh sektor pendidikan yang diproksikan dengan rata-rata lama sekolah (RLS), jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan belanja pemerintah terhadap pengangguran di Indonesia. Model penelitian menggunakan metode regresi panel data dengan ruang lingkup 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan rata-rata lama sekolah dan belanja mempengaruhi negatif terhadap pengangguran. Kemudian variabel jumlah penduduk, tingkat kemiskinan mempengaruhi positif terhadap pengangguran..

---

Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Bandung<sup>2</sup>

Email: [bayu\\_kharisma@yahoo.com](mailto:bayu_kharisma@yahoo.com)<sup>2</sup>

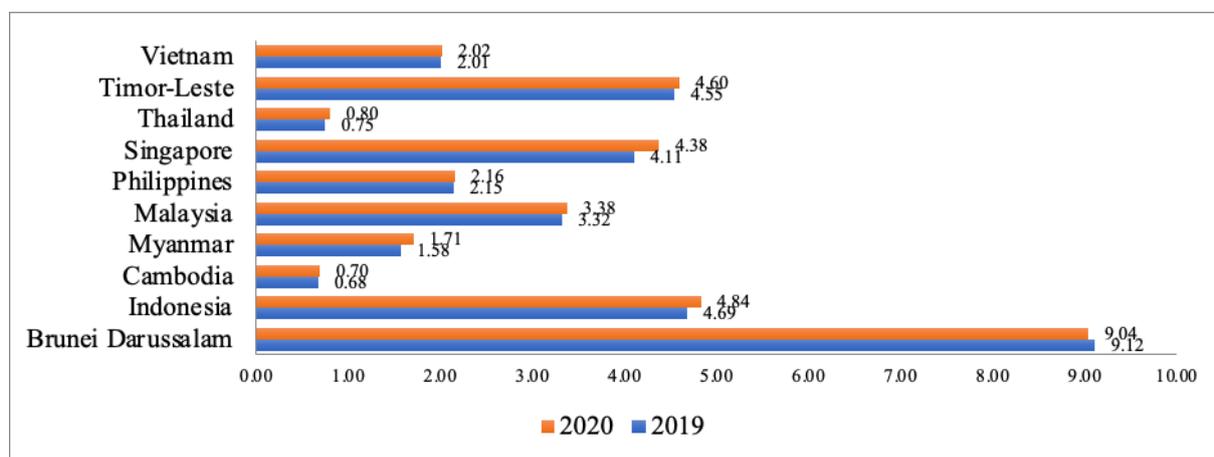
---

## PENDAHULUAN

Pengangguran menjadi permasalahan serius bagi suatu negara dalam aspek makroekonomi dan aspek standar hidup masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mengarah perluasan lapangan kerja menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi pengangguran. Menurut Mankiw (2006), besarnya pengangguran menunjukkan sumber daya yang produktif akan terbuang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2019) pengangguran merupakan penduduk yang tidak mencari pekerjaan dikarenakan telah diterima bekerja tetapi belum memulai untuk bekerja, sedang mempersiapkan usaha sendiri dan penduduk tidak bekerja yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Individu yang mengalami kehilangan pekerjaan menjadi permasalahan berat secara makro ekonomi, hal ini dikarenakan standar hidup setiap penduduk mengalami penurunan (Mankiw, 2006).

Jumlah pengangguran menjadi masalah serius yang sering terjadi di setiap daerah bahkan negara maju. Permasalahan pengangguran yang tinggi sering terjadi di negara berkembang terutama negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang besar seperti negara Indonesia. Negara Indonesia termasuk negara yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan negara lain. Peningkatan penduduk harus dibarengi dengan perluasan lapangan kerja agar tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran.

Pengangguran di Indonesia tergolong tinggi terlihat dari Gambar 1 yang mengalami peningkatan pengangguran di tahun 2020. Adanya pandemi di tahun 2020 mengakibatkan peningkatan pengangguran di Indonesia akibat banyaknya perusahaan yang memutuskan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja. Pada masa pandemi, aktifitas perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. Permintaan barang dan jasa yang menurun di masa pandemi mengakibatkan penurunan pada input produksi. Beberapa perusahaan di Indonesia melakukan pemutusan tenaga kerja akibat pandemic terutama perusahaan yang mengandalkan padat tenaga kerja (*labor intensive*). Pemutusan tenaga kerja beberapa perusahaan mengakibatkan peningkatan pengangguran. Pandemi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 membuat pertumbuhan pengangguran meningkat lebih tajam. Melihat *share* pengangguran terhadap angkatan kerja di ASEAN, negara Indonesia merupakan pengangguran tertinggi setelah negara Brunei Darussalam. Pada Gambar 1 memperlihatkan peningkatan pengangguran di negara Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya.

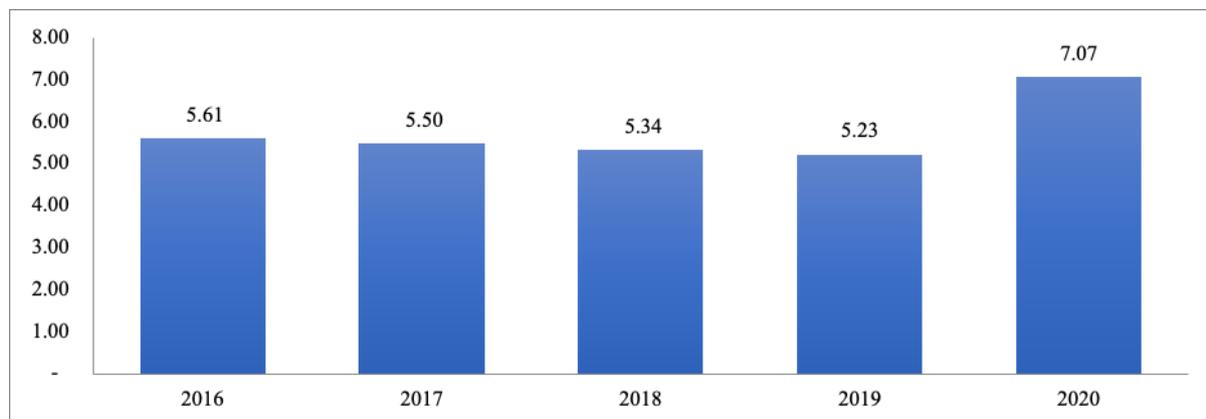


Sumber : BPS (2020)

**Gambar 1.**  
**Angka Pengangguran di Negara ASEAN Tahun 2019-2020 (persen)**

Pertumbuhan pengangguran Indonesia di tahun 2020 merupakan pertumbuhan pengangguran tertinggi selama lima tahun terakhir. Peningkatan pengangguran yang sangat tajam di tahun 2020 sebesar 7.07%, sedangkan pertumbuhan pengangguran di tahun sebelumnya hanya sebesar 5%. Angka pengangguran di Indonesia mencapai kisaran 5% setiap tahunnya (sebelum tahun 2020).

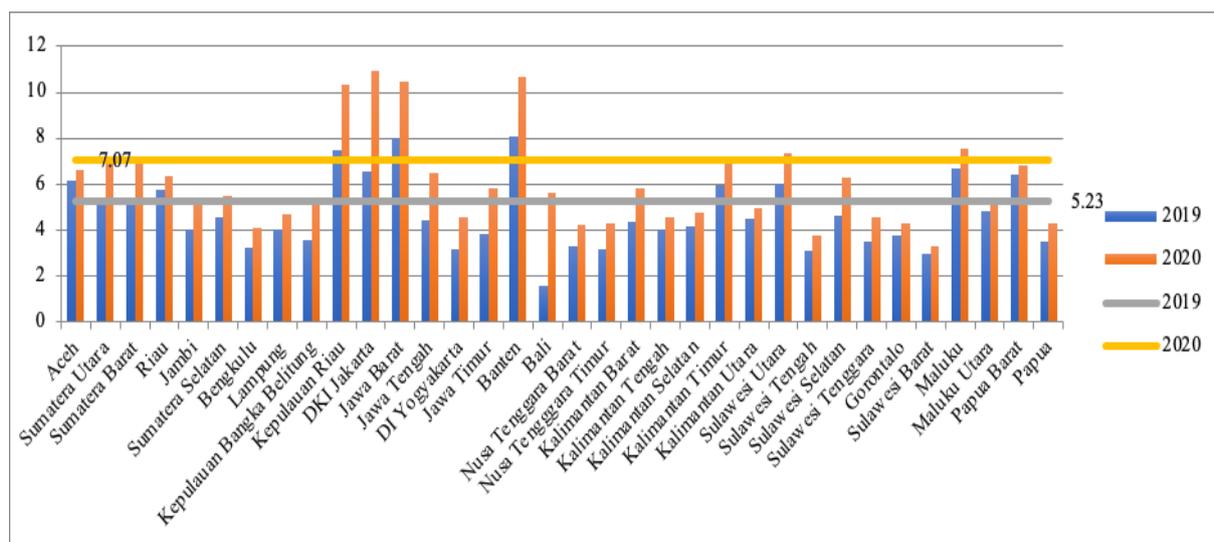
Berdasarkan Gambar 2, pemerintah belum dapat menurunkan angka pengangguran dibawah 5%. Pekerjaan yang sangat berat dan serius bagi pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Menurut Raharja & Manurung dalam Hindun, (2019), peningkatan pengangguran akibat kondisi ketidaksesuaian antara pekerjaan dan pendididkan serta kemampuannya.



Sumber : BPS (2020)

**Gambar 2.**  
**Pengangguran di Indonesia Tahun 2016-2020 (persen)**

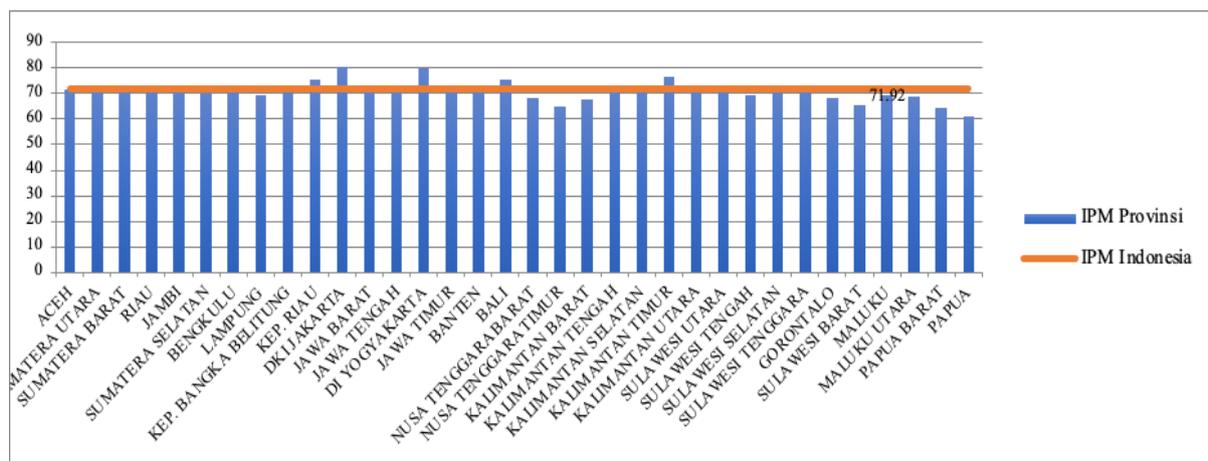
Perkembangan pengangguran setiap provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3. Beberapa daerah yang memiliki perekonomian strategis memiliki pengangguran yang cukup besar. Angka pengangguran provinsi yang melebihi pengangguran Indonesia di tahun 2019 berada di Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI, Jawa Barat, Banten, Kaltim, Sulut, Maluku dan Papua Barat. Provinsi yang memiliki angka pengangguran diatas angka pengangguran negara Indonesia di tahun 2020 yaitu Kepulauan Riau, DKI, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara dan Maluku. Provinsi Kepulauan Riau, DKI dan Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Permasalahan pengangguran di Indonesia tidak hanya melibatkan tugas pemerintah pusat saja melainkan pemerintah daerah pun akan memikirkan cara menurunkan pengangguran.



Sumber : BPS (2020)

**Gambar 3**  
**Pengangguran Provinsi di Indonesia (persen)**

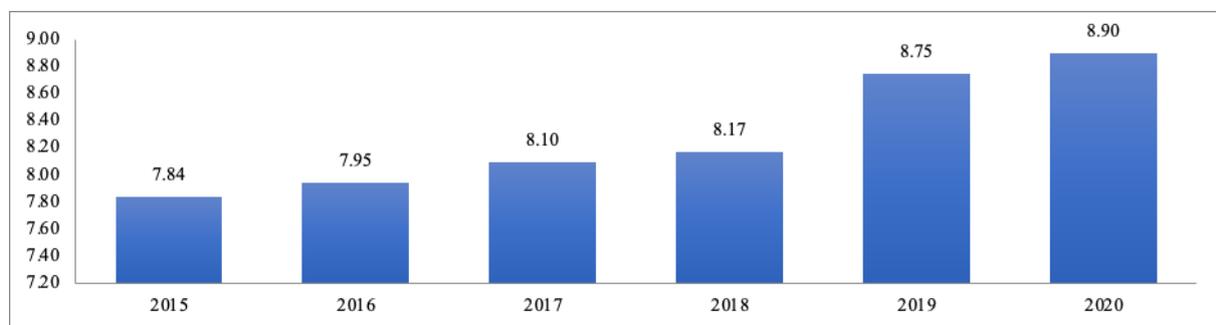
Beberapa provinsi terlihat tingkat pengangguran masih melebihi angka pengangguran Indonesia. Selain itu, pemerintah berupaya mendorong masyarakat dalam menciptakan lapangan usaha melalui peningkatan kewirausahaan. Penciptaan lapangan kerja harus dibarengi dengan peningkatan pendidikan masyarakat di Indonesia. Salah satu ukuran keberhasilan program pendidikan maupun kualitas SDM dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Indonesia (IPM) dan Rata Lama Sekolah RLS. Perkembangan IPM seluruh Provinsi dan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4. Secara umum provinsi di Indonesia sudah memiliki IPM berkategori tinggi dan sedang. Beberapa provinsi sudah melebihi IPM Indonesia seperti Kepulauan Riau, DKI, Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Timur, sedangkan provinsi lainnya sudah mendekati nilai IPM Indonesia. Namun ada beberapa provinsi yang masih berada di bawah nilai IPM Indonesia yaitu NTB, NTT, Kalbar, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Sembilan provinsi di Indonesia masih berada dibawah nilai IPM Indonesia.



Sumber : BPS (2020)

**Gambar 4.**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia Tahun 2019 (Indeks)**

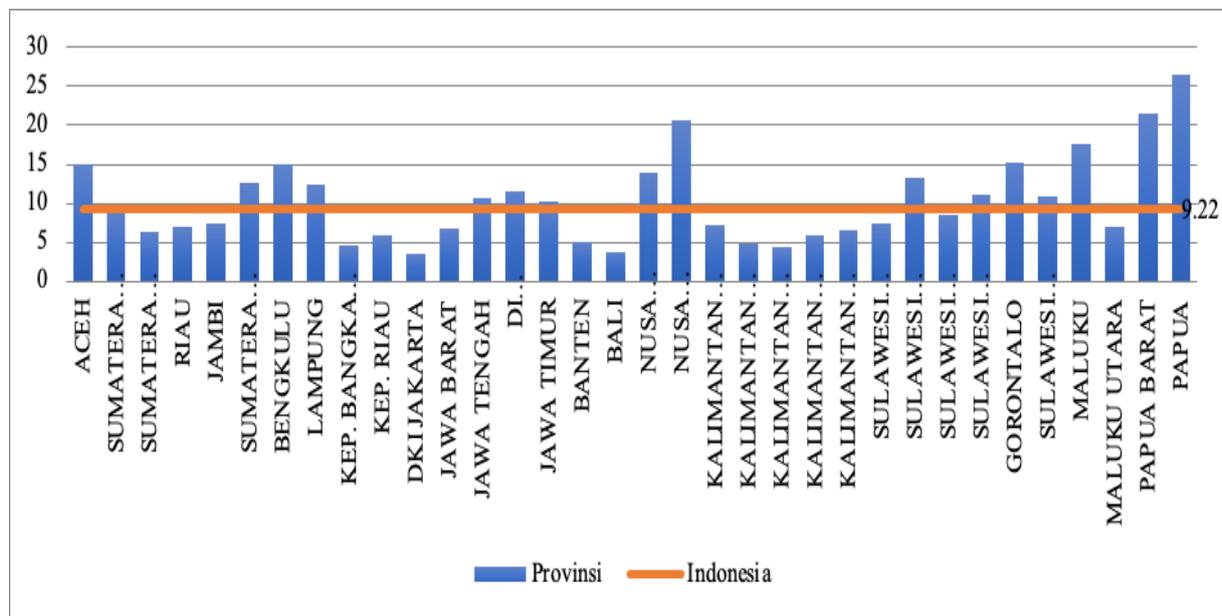
Selanjutnya rata-rata lama sekolah (RLS) Indonesia pada tahun 2015-2020 menunjukkan grafik yang terus meningkat terlihat pada Gambar 5. Perkembangan RLS mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, namun peningkatan RLS belum dapat mencapai program pendidikan yang direncanakan oleh pemerintah di Indonesia. Indikator RLS merupakan tolak ukur keberhasilan pendidikan dalam pencapaian pendidikan pada program wajib belajar sembilan. Secara umum, peningkatan RLS di Indonesia dalam setiap tahun masih belum mencapai target belajar sembilan tahun.



Sumber : BPS (2020)

**Gambar 5.**  
**Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia Tahun 2015-2020 (Jiwa)**

Besarnya pengangguran diawali dari latar belakang penduduk miskin sehingga kesempatan kerja yang didapat sangat rendah akibat terkendala dengan masalah pendidikan. Beberapa daerah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan diatas kemiskinan negara Indonesia. Daerah yang memiliki tingkat kemiskinan melebihi kemiskinan di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua. Angka kemiskinan setiap provinsi di Indonesi dapat dilihat pada Gambar 6.



Sumber : BPS (2020)

**Gambar 6.**  
**Angka Pengangguran Provinsi di Indonesia Tahun 2019 (Persen)**

Pemerintah provinsi di Indonesia berupaya untuk membenahi beberapa faktor yang dapat menurunkan angka pengangguran. Faktor pendidikan menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas SDM meskipun tidak secara langsung menurunkan pengangguran di Indonesia. Faktor kemiskinan menjadi salah satu permasalahan serius dikarenakan dapat berhubungan langsung dengan peningkatan angka pengangguran.

Beberapa penelitian mengenai determinan pengangguran antara lain telah dilakukan oleh Güçlü, (2017) menggunakan metode spatial error (SEM) dan spatial lag model (SAR) untuk menganalisis fenomena kesenjangan tingkat pengangguran antar wilayah di Turki serta mengetahui efek *spillover-nya*. Serneels, (2004) mempelajari sifat pengangguran kaum muda dan menganalisis insiden dan durasi pengangguran di Ethiopia menyimpulkan bahwa pengangguran kaum muda perkotaan untuk laki-laki tinggi pada 50% pada tahun 1994 dan durasi rata-rata sekitar 4 tahun. Sementara itu, durasi lebih pendek terjadi pada individu yang bercita-cita untuk pekerjaan sektor publik dengan gaji tinggi dan memiliki ayah adalah pegawai negeri. Broussar & Tekleselassie, (2012) menggunakan data dari Gelombang Survei Sosial Ekonomi Perkotaan tahun 1994 dan 2000, mempelajari insiden pengangguran kaum muda di Ethiopia dengan fokus khusus pada pemuda perkotaan dan menemukan bahwa pengangguran kaum muda tinggi di lebih dari 50% Muhammedhussen Batu, (2016) juga mempelajari determinan wirausaha di perkotaan Ethiopia dan menyimpulkan bahwa wirausaha lebih sedikit di antara kaum muda, berpendidikan dan mereka yang bermigrasi ke daerah perkotaan baru-baru ini.

Pemberontakan baru-baru ini di Timur Tengah terutama di Mesir dan Tunisia yang menggulingkan rezim masing-masing dimotivasi oleh masalah sosial ekonomi utama seperti meningkatnya pengangguran (Behr & Aaltola, 2011). Pendidikan tinggi yang di tamatkan oleh penduduk suatu wilayah di Indonesia memiliki dampak terbesar dalam penurunan tingkat

pengangguran baik di suatu wilayah maupun di wilayah tetangganya (Oktafianto et al., 2019). Msigwa & Kipesha, (2013) menunjukkan bahwa jenis kelamin, lokasi geografis, pendidikan, keterampilan dan status perkawinan merupakan faktor penting dalam menjelaskan perbedaan dalam status pekerjaan kaum muda di Tanzania. Godfrey, (2003) menyatakan bahwa masalah pengangguran di kalangan pemuda lebih tinggi dibandingkan dengan populasi orang dewasa di negara maju dan berkembang. Faktor-faktor seperti kurangnya pengalaman dan keterampilan, ketidakcocokan keterampilan dan usia putus sekolah yang rendah dikatakan berkontribusi pada pengangguran kaum muda yang tinggi dibandingkan dengan populasi orang dewasa. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba menganalisa faktor krusial dari pendidikan, penduduk, kemiskinan terhadap angka pengangguran antara provinsi di Indonesia. Faktor lainnya seperti belanja pemerintah menjadi salah satu indikator yang akan diteliti pada penelitian ini dalam mempengaruhi tingkat angka pengangguran.

## METODE PENELITIAN

Model penelitian menggunakan regresi *panel data*, penelitian diawali dengan pengujian chow test untuk menentukan apakah model menggunakan *common effect* atau *fixed effect*. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian Hausmann test dalam menentukan model yang akan digunakan *fixed effect* atau *random effect*. Selanjutnya penelitian ini melakukan pengujian statistic yaitu Uji t, Uji F dan uji asumsi klasik (Multikolinearitas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Dirjen Perimbangan dan Keuangan RI (DJPk). Variabel dependen yang digunakan penelitian ini adalah variabel pengangguran, sedangkan variabel penjelasan dalam penelitian yaitu variabel pendidikan yang diprosikan Rata Lama Sekolah (RLS), populasi (POP), tingkat kemiskinan (POV) dan belanja pemerintah (GXPCAP). Data yang digunakan adalah data sekunder secara panel data. Analisis yang digunakan bersifat data time series dari tahun 2011-2019 dan data cross section yang berjumlah 33 Provinsi di Indonesia. Model yang digunakan pada penelitian ini mengacu (Feriyanto, 2018) adalah sebagai berikut:

$$UNEMP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 RLS_{it} + \alpha_2 \ln POP_{it} + \alpha_3 POV_{it} + \alpha_4 \ln GXPCAP_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Variabel pengangguran (UNEMP) dan kemiskinan (POV) dalam penelitian ini menggunakan nilai persentase, rata lama sekolah dalam satuan tahun, jumlah pendudukan dan pengeluaran pemerintah dalam logaritma natural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari estimasi ini menggunakan regresi panel data dan metode fixed effect merupakan metode yang paling cocok berdasarkan hasil uji Hausman (terlampir). Kemudian hasil regresi panel data bebas dari permasalahan uji asumsi klasik, baik uji multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas dikarenakan telah menggunakan model regresi *Generalizes Least Square*.

**Tabel 1.**  
**Hasil Regresi Pengangguran di Indonesia**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	6.828	3.384	0.000
RLS(-1)	-0.536	-2.235	0.026
LNPOP	0.167	4.666	0.000
POV	0.166	3.689	0.000
LNGXPCAP	-0.033	-1.904	0.058
Adjusted R-squared	0.925596		
F-statistic	89.84		
Prob(F-statistic)	0.0000		

Sumber : Hasil Perhitungan, 2021

Rata-rata lama sekolah (RLS), populasi (LNPOP), kemiskinan (POV) dan belanja pemerintah (LNGXPCAP) mempengaruhi pengangguran secara signifikan. Nilai koefisien setiap variabel independen terlihat pada Tabel 1 dalam mempengaruhi pengangguran di Indonesia. Variabel Rata lama sekolah (RLS) tahun sebelumnya mempengaruhi secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap pengangguran di Indonesia. Nilai koefisien dari rata lama sekolah sebesar -0.536, maka setiap kenaikan 1 tahun dari RLS akan menurunkan pengangguran sebesar 0.536% dengan asumsi *ceteris paribus*.

Pendidikan menjadi peranan penting dalam meningkatkan tenaga kerja berkualitas. Pekerja yang memiliki pendidikan maupun keterampilan akan memberikan keunggulan komparatif dalam mendapatkan pekerjaan. Para pengusaha cenderung menginginkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga pengusaha akan mempertahankan pekerja dengan latar pendidikan lebih tinggi. Bagi pekerja yang sempat berhenti atau kehilangan pekerjaan, maka bagi pekerja berpendidikan dipekerjakan kembali dalam waktu yang lebih lama dan berbeda dengan pekerja yang berpendidikan relatif lebih rendah. Penduduk Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan rendah mayoritas bekerja pada tenaga kerja non professional (buruh kasar dll). Peningkatan pengangguran dapat semakin besar apabila kondisi RLS di setiap provinsi belum memenuhi program pendidikan seperti wajib belajar sembilan tahun. Pengangguran dapat disebabkan dari ketidakseimbangan lapangan usaha dan tenaga kerja. Adanya tingkat persaingan yang ketat pada setiap lulusan menjadi salah satu penyebab ketidakseimbangan pekerjaan dengan tenaga kerja.

Penduduk yang menamatkan pendidikan semakin sulit untuk meraih pekerjaan dikarenakan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat sedikit. Ledakan penduduk memicu peningkatan pengangguran sehingga para lulusan usia muda cenderung tidak memiliki pekerjaan. Penelitian Pasay & Indrayanti, (2012), bahwa jenjang pendidikan semakin tinggi akan semakin lama dalam mencari pekerjaan dibandingkan dengan tamatan sekolah menengah (SMA maupun SMP). Menurut laporan ILO (2007), penduduk usia muda yang berpendidikan menengah atas berasal dari keluarga dengan penghasilan menengah maupun atas. Pada umumnya penduduk usia muda masih tinggal bersama orang tua sehingga penduduk usia muda berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar pendidikannya dan dapat memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya pendidikan semakin tinggi berdampak dengan *opportunity cost* yang semakin besar sehingga keinginan untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar.

Menurut Aden dalam Hindun, (2019), pengangguran secara umum terjadi di antara pekerja yang tidak berpendidikan. Pemerintah membuat program pendidikan bertujuan untuk mencapai standar pendidikan yang diinginkan oleh para pengusaha sehingga pengangguran dapat diturunkan. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkualitas diharapkan masyarakat dapat memenuhi program pemerintah di bidang pendidikan seperti program wajib belajar. Namun kondisi provinsi di Indonesia dalam capaian program wajib belajar sembilan tahun masih banyak yang tidak terpenuhi. Program pemerintah dalam sektor pendidikan tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerja secara profesional. Masyarakat yang mampu mencapai pendidikan tinggi diharapkan mampu memahami perubahan teknologi, tetapi bagi masyarakat yang memiliki pendidikan rendah sangat sulit untuk memahami teknologi sehingga menurunkan kualitas kinerja.

Variabel populasi (LNPOP) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Besaran koefisien populasi yaitu 0.167, maka peningkatan populasi sebesar 1% akan berdampak terhadap peningkatan pengangguran di Indonesia 0.167% dengan asumsi *ceteris paribus*. Menurut Bidemi & F S A (2020), adanya hubungan positif antara penduduk dengan pengangguran dikarenakan penambahan penduduk usia bekerja tanpa dibarengi perluasan lapangan kerja yang dapat meningkatkan jumlah pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk, pemerintah daerah akan berupaya menyediakan lapangan kerja. Jumlah penduduk yang semakin besar menimbulkan permasalahan serius terutama bagi daerah perkotaan. Pertambahan penduduk di perkotaan akan memicu pengangguran disebabkan lapangan kerja yang terbatas. Pulau Jawa menjadi salah satu contoh di Indonesia sebagai pusat pertumbuhan dan penduduk terbesar di Indonesia, sehingga lapangan kerja menjadi sempit dan memperbesar jumlah pengangguran. Peningkatan penduduk akan memperbesar angkatan kerja yang dapat menimbulkan permasalahan dalam menyediakan lapangan kerja.

Indikator kemiskinan (POV) sebagai variabel independen mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengangguran. Nilai koefisien dari kemiskinan sebesar 0.166, setiap kenaikan 1%

akan meningkatkan pengangguran sebesar 0.166%. Penduduk miskin yang hanya mengandalkan subsidi pemerintah akan sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Penduduk miskin berpeluang menjadi pengangguran dikarenakan banyak masyarakat yang tidak menamatkan pendidikan atau tidak memiliki pendidikan yang sesuai klasifikasi lowongan pekerjaan. Adanya hubungan kausalitas antara kemiskinan dengan pengangguran yang mengarah dalam konvergensi yang diawali dengan guncangan akibat tingginya inflasi, daya beli masyarakat yang menurun dan nilai kurs yang melemah (Akhmad, 2020).

Variabel belanja pemerintah (LNGXPCAP) berhubungan negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Nilai koefisien dari LNGXPCAP sebesar -0.033, kenaikan belanja pemerintah sebesar 1% akan menurunkan pengangguran sebesar 0.033%. Menurut (Shigwedha & Kaulihowa, 2020), adanya hubungan negatif antara belanja pemerintah dengan pengangguran di akibatkan oleh kenaikan belanja publik yang pada akhirnya mengarah pada penciptaan lapangan kerja. Belanja pemerintah menjadi salah satu input modal dalam mensinergiskan dengan tenaga kerja. Besaran belanja pemerintah akan memperbesar aktifitas perekonomian sehingga dapat menyebabkan pertambahan produksi. Peningkatan produksi akan meningkatkan input tenaga kerja sehingga pengangguran akan berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Alrayes & Abu Wadi, 2018), bahwa besaran penggunaan yang dibelanjakan pemerintah menentukan besaran pengangguran.

Belanja pemerintah digunakan untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung aktifitas perekonomian maupun kualitas SDM. Peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga diharapkan pengangguran semakin berkurang. Begitu pula dengan peningkatan belanja yang mengarah terhadap peningkatan infrastruktur. Perkembangan infrasktruktur akan mendorong peningkatan kinerja perekonomian maupun output di suatu daerah. Peningkatan output dapat disebabkan oleh peningkatan input produksi seperti tenaga kerja. Jadi peningkatan belanja dibidang infrasktruktur dapat menurunkan angka pengangguran melalui kebijakan serta mekanisme yang dibuat oleh pemerintah.

Selama ini kontribusi terbesar lapangan kerja di Indonesia disumbangkan oleh sektor industri. Namun berbagai kendala yang terjadi di Indonesia seperti beberapa perusahaan asing yang bergerak di sektor industri beralih ke negara lain akibat terjadi peningkatan upah minimum di Indonesia. Beberapa solusi yang dapat menurunkan pengangguran dan tidak harus mengandalkan sektor industri dengan mendorong sektor jasa untuk lebih berkembang. Saat ini, berkembangnya sektor jasa melalui penjualan jasa *on-line (e commerce)* menjadi salah satu solusi dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong jiwa kewirausahaan yang berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dapat memberikan sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat yang bergerak di sektor jasa seperti pemberian kredit dan pelatihan. Menurut Rabiou et al, (2019), pemerintah daerah mencari solusi untuk meningkatkan mata pencaharian bagi masyarakat melalui pemberian modal (kredit), pelatihan siap kerja dan peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menjelaskan rata lama sekolah (RLS) tahun sebelumnya dan belanja pemerintah (LNGXPCAP) berhubungan negatif terhadap pengangguran, sedangkan populasi (LNPOP) dan kemiskinan (POV) memiliki hubungan yang positif terhadap pengangguran. Variabel RLS tahun sebelumnya merupakan variabel yang paling mempengaruhi terhadap pengangguran di Indonesia. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat menjadi hal yang penting dalam menurunkan pengangguran. Masyarakat harus mampu mengenyam pendidikan sesuai program pemerintah seperti peningkatan target wajib belajar sembilan tahun dimana beberapa daerah di Indonesia masih ada yang belum mampu mencapai program pemerintah di bidang pendidikan. Penurunan pengangguran di beberapa provinsi Indonesia dapat dilakukan melalui peningkatan standar hidup. Peningkatan standar hidup harus dibarengi dengan memperbanyak penduduk berstatus sebagai pekerja formal. Oleh karena itu, peningkatan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan menjadi salah satu solusi untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja akan memicu tingginya pengangguran. Pemutusan hubungan kerja akibat upah minimum regional yang terus meningkat sehingga banyak perusahaan yang beralih ke negara

lain. Lapangan kerja yang terbatas dan persaingan pasar global yang sangat tinggi membuat perusahaan mempekerjakan daerah asal dibandingkan penduduk asli. Kemudian daerah yang kurang memiliki potensi ekonomi serta jauh dari lapangan kerja membuat masyarakat di daerah tersebut sulit mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Penurunan masyarakat miskin menjadi sasaran penting dalam menurunkan tingkat pengangguran. Upaya pemerintah dalam menanggulangi besaran masyarakat miskin dapat melalui program bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan. Ketiga program tersebut dapat terealisasi maka masyarakat akan lebih baik dan percaya diri dalam mencari pekerjaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan semakin memperkecil jarak antara kemiskinan dan pengangguran, sehingga perlu melakukan berbagai upaya berupa peningkatan pendidikan dan kesehatan pada penduduk usia muda di Indonesia. Selanjutnya belanja pemerintah disesuaikan dengan perencanaan anggaran sehingga program pemerintah untuk masyarakat menjadi lebih produktif dan sesuai dengan target pembangunan.

## REFERENSI

- Akhmad, A. (2020). Hubungan Kausalitas Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Balance*, 16(1), 13–23.
- Alrayes, S. E., & Abu Wadi, R. M. (2018). Determinants of Unemployment in Bahrain. *International Journal of Business and Social Science*, 9(12), 64–74. <https://doi.org/10.30845/ijbss.v9n12p8>
- Behr, T., & Aaltola, M. (2011). The Arab uprising. Causes, prospects and implications. *Fiiia Briefing Paper 76*.
- Bidemi, J., & F, S. A. (2020). *Dynamic Effect of Population Growth on Unemployment Rate in Nigeria*. 8471, 103–113.
- Broussar, N. H., & Tekleselassie, T. G. (2012). Youth Unemployment, Ethiopia Country Study. *International Growth Centre (IGC) Working Paper*.
- Feriyanto, N. (2018). Determinants of unemployment in regency/ city in special province Yogyakarta. *European Research Studies Journal*, 21(3), 367–380. <https://doi.org/10.35808/ersj/1388>
- Godfrey, M. (2003). Youth Employment Policy in Developing and Transition Countries - Prevention as well as Cure. *October*.
- Güçlü, M. (2017). Regional unemployment disparities in Turkey. *Romanian Journal of Economic Forecasting*.
- Hindun. (2019). Impact of Education Level on Unemployment Rate in Indonesia. *International Journal of Educational Research Review*, 2(1), 321–324. <https://doi.org/10.24331/ijere.573866>
- ILO. (2007). *Equality at Work: Tackling the Challenges: Global Report Under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* (Vol. 1). International Labour Organization.
- Mankiw, G. . (2006). *Macroeconomics* (9th Editio). Worth Publishers.
- Msigwa, R., & Kipesha, E. F. (2013). Determinants of Youth unemployment in Developing Countries : Evidences from Tanzania. *Journal of Economics and Sustainable Development* 4(14), 12-34.
- Muhammedhussen Batu, M. (2016). Determinants of Youth Unemployment in Urban Areas of Ethiopia. *International Journal of Scientific and Research Publications*.
- Oktafianto, E. K., Achsani, N. A., & Irawan, T. (2019). The Determinant of Regional Unemployment in Indonesia: The Spatial Durbin Models. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.15408/sjie.v8i2.10124>
- Pasay, N. H. A., & Indrayanti, R. (2012). Pengangguran, Lama Mencari Kerja, dan Reservation Wage Tenaga Kerja Terdidik. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 116–135.
- Rabiu, M., Saidu, M. kabiru, Mukтари, Y., & Nafisa, M. (2019). Impact of Population Growth on Unemployment in Nigeria: Dynamic OLS Approach. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 10(22), 79–89. <https://doi.org/10.7176/jesd/10-22-09>
- Serneels, P. (2004). The Nature of Unemployment in Urban Ethiopia. In *CSAE WPS*.

---

Shigwedha, W. N., & Kaulihowa, T. (2020). Investigating the Effects of Government Expenditure and Money Supply on Unemployment in Namibia. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 12(4 ), 73–83.